

ANALISIS PENERAPAN PSAK NO. 18 MENGENAI DANA PENSIUN Pada PT.POS INDONESIA CABANG TOMOHON

Amelia Moningka¹, Frida Sumual², Olifia Tala³

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Manado, Indonesia

e-mail: moningkaamelia@gmail.com, fridasumual@unima.ac.id, olifiatala@unima.ac.id

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis PSAK No. 18 terhadap prosedur dan perlakuan akuntansi keuangan yang berlaku pada dana pensiun PT. Pos Indonesia Cabang Tomohon. Program manfaat purnakarya atau yang dikenal dengan dana pensiun tujuan untuk menciptakan dana untuk mengolah pendapatan secara berkelanjutan hingga hari tua sehingga karyawan dapat terjamin kelangsungan hidupnya. Dana pensiun PT. Pos Indonesia Cabang Tomohon menyelenggarakan PPMP atau program pensiun manfaat pasti. Standar sebagai acuan, dalam hal ini adalah Standar Akuntansi Keuangan (SAK), khususnya PSAK No. 18, yang diperlukan untuk menghindari penyalahgunaan pengelolaan dan pembayaran dana pensiun yang mengakibatkan kerugian bagi karyawan dan perusahaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yang melihat proses implementasi di dana pensiun dan menganalisis data yang ada. Berdasarkan analisis tersebut, disimpulkan bahwa Dana Pensiun atau Program Pensiun PT. Pos Indonesia Cabang Tomohon telah memenuhi standar dan peraturan yang berlaku dan akan terus menerapkan dan memelihara standar tersebut secara lebih optimal.

Kata Kunci : PSAK 18, Dana Pensiun

ABSTRACT : *The purpose of this study aims to analyze PSAK No. 18 on financial reporting disclosures that apply to the pension fund of PT. Pos Indonesia Cabang Tomohon. The retirement benefit program or known as the pension fund aims to create funds to process income sustainably until old age so that employees can be assured of their survival. The pension fund of PT. Pos Indonesia Cabang Tomohon organizes PPMP or defined benefit pension plan. Standards as a reference, in this case Financial Accounting Standards (FAS), especially PSAK No. 18, are needed to avoid mismanagement and payment of pension funds that result in losses for employees and companies. The method used in this research is a qualitative descriptive method that looks at the implementation process in pension funds and analyzes existing data. Based on the analysis, it is concluded that the Pension Fund or Pension Program of PT. Pos Indonesia Cabang Tomohon has met the applicable standards and regulations and will continue to implement and maintain these standards more optimally.*

Keywords: PSAK 18, Pension Fund

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Jaminan kesejahteraan adalah hal terpenting bagi setiap orang yang bekerja. Untuk itu, setiap pekerja berusaha melakukan kewajiban kerja dengan sebaik-baiknya. Namun dengan berusaha sebaik-baiknya dalam bekerja tidaklah cukup tanpa adanya penyisihan pendapatan selama masa aktif bekerja dimana harapan untuk menikmati kesejahteraan di hari tua setelah pensiun sulit untuk terwujud. Adanya program manfaat purnakarya memungkinkan terbentuknya suatu akumulasi dana yang dibutuhkan untuk memelihara kesinambungan penghasilan peserta program manfaat purnakarya. Keyakinan akan adanya kesinambungan penghasilan menimbulkan ketentraman kerja, sehingga akan meningkatkan motivasi kerja. Selain itu, loyalitas terhadap perusahaan juga akan meningkat. Program manfaat purnakarya di Indonesia tergolong sebagai program lama. Buktinya peraturan yang mengatur tentang program manfaat purnakarya sudah beberapa kali diperbarui. Awalnya program manfaat purnakarya diatur dalam PSAK 18 yaitu tentang Akuntansi Dana Pensiun yang telah dikeluarkan pada tanggal 7 September 1994, lalu direvisi dan disahkan oleh Dewan Standar

Akuntansi Keuangan pada tanggal 22 Oktober 2010 menjadi Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya.

PT. Pos Indonesia sebagai organisasi moneter kepercayaan publik yang mengambil bagian penting dalam kerangka moneter, sehingga dapat dikatakan bahwa kantor pos adalah jiwa dari kerangka moneter yang dinamis yang beraktivitas menerima simpanan masyarakat dalam bentuk uang. PT. Pos Indonesia sebagai substansi bisnis yang bergerak di bidang jasa, kepercayaan dari semua pihak-pihak yang terkait sangat penting, baik untuk pemilik dan pegawainya. Pekerja memainkan peran penting untuk memberikan dukungan terbaik kepada masyarakat dan memberikan eksekusi yang ideal sehingga masyarakat merasa terlayani dengan baik.

Oleh karena itu, penting untuk menata organisasi agar dapat mempertahankan upaya untuk mengikuti gaji yang layak di usia lanjut. Hal tersebut adalah dana pensiun. Dengan adanya tunjangan hari tua ini, para pekerja tidak perlu lagi pusing memikirkan masalah persoalan hari tua (usia lanjut) karena akan ada imbalan yang akan didapatkan oleh para pekerja ketika mereka sudah tidak mampu lagi untuk bekerja karena faktor usia yang sudah tidak memungkinkan lagi. Pensiun sebagian besar atas kemauan sendiri atau karena usia lanjut dan telah tiba pada usia pensiun. PT. Pos Indonesia Cabang Tomohon menyelenggarakan program dana pensiun (dapen) yang bertujuan guna untuk ketentraman para pekerja di usia lanjut dan memelihara kesinambungan penghasilan pada hari tua para pesertanya.

Freddy S.Kawatu, (2022) menuliskan bahwa mengelola keuangan bukanlah suatu pekerjaan yang mudah, tapi sangat dibutuhkan konsentrasi yang tinggi dan ketelitian dalam menghitung, menginput, hingga membuat laporan keuangan Menurut James Manengkey (2020) Standar akuntansi merupakan masalah penting dalam profesi dan semua pemakai laporan keuangan. Oleh karena itu, mekanisme penyusunan standar akuntansi harus diatur sedemikian rupa sehingga dapat memberikan kepuasan kepada semua pihak yang Pelaporan dana pensiun harus sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku agar dapat dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan sehingga tidak memberikan keputusan yang salah. Pengelolaan dana pensiun baik pada setiap Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) diberi kesempatan mendirikan dana pensiun bagi pegawainya. Sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Undang-undang No 11 tahun 1992 yang mengatur tentang dana pensiun, bahwa tugas utama dana pensiun berdasarkan maksud dan tujuannya yaitu mengelola dan mengembangkan dana guna menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti (PMP) untuk memelihara kesinambungan dan penghasilan bagi peserta pada hari tua.

Mengingat bahwa dana pensiun mempunyai tujuan dan kegiatan usaha yang berlainan pada perusahaan umumnya maka perlu disusun standar akuntansi keuangan (SAK) yang berlaku khusus untuk dana pensiun sebagai pedoman proses akuntansi serta proses penyusunan laporan keuangan yaitu pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No.18. Pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No. 18 sebelumnya pernah di teliti oleh beberapa peneliti terhadap bagaimana penerapan PSAK No.18 yang diterapkan pada perusahaan yang ada di Indonesia terhadap ketentuan yang berlaku.

Puspitasari dkk (2016) dengan judul penelitian evaluasi penerapan standar akuntansi keuangan No.18 tentang akuntansi dan pelaporan program manfaat purnakarya PT.Bank Negara Indonesia (Persero) tbk, menganalisis kesesuaian penerapan standar Akuntansi Keuangan No.18 pada pelaporan dana pensiun Bank Negara Indonesia karena dilihat dari

pelaporan keuangan manfaat purnakarya masih terdapat beberapa kekurangan dalam pelaporan program manfaat iuran pasti purnakarya. Kemudian pada Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses akuntansi yang diterapkan oleh dana pensiun Lembaga Keuangan BNI secara keseluruhan telah sesuai dengan PSAK No.18.

Yunus,A, Fitri, F,dk (2023),dengan judul analisis penerapan PSAK No.18 akuntansi dana pensiun pada PT.Bank BTPN Makasar hasil penelitian Berdasarkan hasil penelitian Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 18 mengenai akuntansi dana pensiun dapat disimpulkan bahwa pencatatan dan pelaporan dana pensiun PT. Bank BTPN Makassar telah sesuai dengan Penerapan Standar Akuntansi Keuangan PSAK No 18.Dari penerapan PSAK yang diterapkan oleh penelitian sebelumnya maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada PT. Pos Indonesia Cabang Tomohon.

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah apakah prosedur perlakuan akuntansi dana pensiun PT.Pos Indonesia cabang Tomohon telah sesuai dengan PSAK No.18. Untuk menjawab permasalahan ini, penulis merancang pemecahan melalui penekatan deskriptif kualitatif. Dengan demikian tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui kesesuaian prosedur dan perlakuan akuntansi dana pensiun di PT.Pos Indonesia Cabang Tomohon jika sudah sesuai dengan PSAK No.18.

KAJIAN TEORI

Akuntansi secara umum menurut Taswan (2015:5) bisa didefinisikan sebagai seni, ilmu, sistem informasi yang didalamnya menyangkut pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran dengan cara sepatutnya dan dalam satuan uang transaksi dan kejadian yang setidak-tidaknya sebagian mempunyai sifat keuangan serta adanya penginterpretasian hasil pencatatan dan disajikan dalam laporan keuangan. Jadi akuntansi adalah ilmu atau seni akuntansi yang menyangkut transaksi, pencatatan pengklasifikasian dan peringkasan yang terjadi dalam suatu peristiwa ekonomi yang berguna bagi pemakai informasi sebagai dasar pengambilan keputusan. Menurut Tinekke Sumual (2020) Akuntansi merupakan suatu proses pengukuran dan pencatatan dalam pengelolaan basis kekayaan yang nantinya akan menghasilkan informasi keuangan, informasi keuangan ini berupa laporan keuangan yang telah disusun oleh instansi kemudian ditujukan pada pihak yang berkepentingan guna untuk pengambilan keputusan. Jadi akuntansi merupakan suatu seni, ilmu meyangkut proses pengukuran dan pencatatan yang akan menghasilkan informasi keuangan atau akuntansi yang menjadi dasar sebagai pengambilan keputusan.

Akuntansi terus berkembang mengikuti perkembangan dunia bisnis yang semakin kompleks belakangan ini, Semakin luasnya jaringan bisnis juga menambah kompleksitas informasi yang harus disajikan akuntansi secara benar, tepat, singkat, tetapi juga jelas dan menyeluruh. Akuntansi dana pensiun dimaksudkan untuk menyajikan informasi keuangan yang dapat digunakan untuk memperkirakan kemampuan. Dana pensiun pada masa sekarang maupun dimasa yang akan datang dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar manfaat pensiun kepada peserta pada waktu mereka pensiun. Masalah yang penting dalam akuntansi dana pensiun menentukan berapa jumla kewajiban pensiun yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan. Sebagian besar akuntan sepakat bahwa kewajiban pensiun perusahaan adalah kompensasi kepada pegawai yang ditangguhkan dalam jangka waktu tertentu.

Disebutkan dalam kajian Etimology, bahwa kata pensiun atau pension sudah dikenal dalam Bahasa Inggris Abad Pertengahan, yang berasal dari Bahasa Latin "*pension*" sebagai pengembangan dari kata "*pendere*" yang berarti membayar. Asal usul istilah dan definisi kata

pensiun tersebut memberikan gambaran, bahwa pada dasarnya pengertian pensiun atau pembayaran (berkala) kepada seseorang yang mengakhiri masa kerjanya, sudah dikenal sejak lama. Dana pensiun menurut Kasmir (2014:287) adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan (Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, 2011). Penghasilan ini biasanya berupa uang yang dapat diambil setiap bulannya atau diambil sekaligus pada saat seseorang memasuki masa pensiun, hal ini tergantung dari kebijakan yang terdapat dalam suatu perusahaan. Dengan kata lain, pensiun adalah merupakan sumber bagi pemenuhan kebutuhan bagi seseorang, ketika yang bersangkutan sudah tidak produktif lagi.

Fungsi dana pensiun mencakup beberapa hal sebagai berikut.

1. Fungsi asuransi, program pensiun memiliki fungsi asuransi karena memberikan jaminan kepada peserta untuk mengatasi resiko kehilangan pendapatan yang disebabkan oleh kematian atau usia pensiun.
2. Fungsi tabungan, dana pensiun bertugas mengumpulkan dan mengembangkan dana, maka dana tersebut merupakan akumulasi dari iuran peserta, kemudian dana itu akan diperlukan seperti tabungan.

Menurut Undang-Undang No. 11 1992, program pensiun adalah setiap program yang mengupayakan manfaat pensiun bagi pesertanya. Program pensiun mempersiapkan pemberi kerja menyediakan manfaat (pembayaran) kepada pekerja setelah mereka berhenti memberikan jasa, dimana dana tersebut dihimpun selama karyawan bekerja dan pada masa karyawan pensiun, dana dan pendapatan dari investasi perusahaan akan di kembalikan kepada karyawan. Menurut PSAK No.18 (IAI 2015:475) program manfaat pensiun kadang dikenal dengan berbagai istilah, seperti program pensiun, tunjangan hari tua, atau program manfaat purnakarya. Program manfaat purnakarya merupakan perjanjian untuk setiap entitas yang menyediakan manfaat purnakarya untuk karyawan pada saat atau setelah berhenti bekerja (baik dalam bentuk iuran bulanan atau lumpsum) ketika manfaat semacam itu, atau iuran selanjutnya untuk karyawan, dapat ditentukan atau diestimasi sebelum purnakarya berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam dokumen atau praktik-praktik entitas.

Manfaat pensiun merupakan pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun. Pembayaran manfaat pensiun dilakukan secara berkala atau sekaligus, tidak dapat digunakan sebagai jaminan atas pinjaman, dialihkan atau disita. Besarnya dipengaruhi oleh masa kerja, faktor penghargaan, penghasilan dasar pensiun, jenis manfaat pensiun. Perubahan peraturan dana pensiun tidak boleh mengurangi manfaat pensiun.

UU No 11 tahun 1992 pasal 2 jenis kelembagaan dana pensiun dibatasi dalam 2 jenis yaitu dana pensiun pemberi kerja (DPPK) dan dana pensiun lembaga keuangan (DPLK). DPPK, lembaga ini dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri dan penyelenggaraan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawan sebagai peserta. DPLK merupakan dana pensiun yang dibentuk oleh bank dengan status bank umum atau perusahaan asuransi jiwa yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan.

PSAK 18 menganggap program manfaat purnakarya sebagai suatu entitas pelapor yang terpisah dari pemberi kerja yang juga merupakan peserta dalam program manfaat purnakarya (Lusiana lin Puspitasari, 2016). PSAK 18 mengatur akuntansi dan pelaporan program manfaat

purnakarya untuk semua peserta sebagai suatu kelompok. Pernyataan ini tidak mengatur pelaporan peserta secara individual tentang hak manfaat purnakarya.

Program manfaat purnakarya adalah perjanjian untuk setiap entitas yang menyediakan manfaat purnakarya untuk karyawan pada saat atau setelah berhenti bekerja (baik dalam bentuk iuran bulanan atau lumpsum) ketika manfaat semacam itu, atau iuran selanjutnya untuk karyawan, dapat ditentukan atau diestimasi sebelum purnakarya berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam dokumen atau praktik-praktik entitas (Agus Tony Poputra, 2016).

Akuntansi dan pelaporan program manfaat purnakarya mengadopsi IAS 26 Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans per 1 Januari 2009 dan disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada tanggal 22 Oktober 2010. PSAK 18 (2010) menggantikan PSAK 18 (1994): Akuntansi Dana Pensiun.

PSAK 18 ini merevisi PSAK 18 tentang Akuntansi Dana Pensiun yang telah dikeluarkan pada tanggal 17 September 1994. Program manfaat purna karya kadang dikenal dengan berbagai istilah, seperti "program pensiun", "tunjangan hari tua", atau "program manfaat purnakarya" sebagai suatu entitas pelaporan yang terpisah dari pemberi kerja peserta dalam program tersebut. PSAK lain diterapkan untuk laporan keuangan program pensiun sepanjang tidak digantikan oleh pernyataan ini.

Program manfaat pensiun dapat berupa program iuran pasti atau program imbalan pasti. Dalam hal ini program manfaat pensiun diselenggarakan sebagai dana program terpisah, program tersebut harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pernyataan ini tidak mengatur imbalan kerja dalam bentuk lain, seperti kewajiban pemberian pesangon, perjanjian kompensasi yang ditangguhkan, tunjangan cuti jangka panjang, program pensiun dini atau pemutusan kontrak kerja khusus, tunjangan kesehatan dan kesejahteraan, atau program bonus. Jaminan sosial pemerintah juga diluar lingkup pernyataan ini.

Tujuan pelaporan oleh program manfaat pensiun adalah memberikan informasi secara periodik tentang sumberdaya keuangan dan aktivitas program manfaat pensiun yang berguna untuk menilai hubungan antara akumulasi sumber daya dan manfaat program dari waktu-kewaktu.

Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti Tahun	Judul	Metode Analisis Data	Hasil Penelitian
1	Lusiana lin Puspitasari1 Agus Tony Poputra (2016): Jurnal Emba 231 Vol.4 No.1	Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 18 Tentang Akuntansi Dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya Pada Pt. Bank Negara Indonesia(Persero)	Deskriptif Kualitatif	Menunjukkan proses akuntansi yang diterapkan oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan BNI secara keseluruhan telah sesuai dengan PSAK No. 18. Sebaiknya pimpinan bank BNI dapat Nomor 18. mempertahankan kredibilita

				penyusunan Laporan keuangan, agar tetap konsisten sesuai dengan PSAK
2	Jeniver Mira Pandey, (2019)	Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.18 Dana Pensiun Di Bank Mandiri Taspen Cabang Manado	Deskriptif	Proses akuntansi yang diterapkan oleh Dana Pensiun PT Bank Mandiri Taspen Cabang Manado secara keseluruhan telah sesuai dgn PSAK No. 18.
3	Yunus, A., Fitri, F., & Rachma, N. (2023)	Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.18 Akuntansi Dana Pensiun Pada PT. Bank BTPN Makassar	Deskriptif Kualitatif	Pencatatan dan pelaporan dana pensiun PT. Bank BTPN Makassar telah sesuai dengan Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.18

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam hal ini peneliti bertujuan untuk membuktikan apakah pelaporan program manfaat purnakarya PT. Pos Indonesia Cabang Tomohon telah sesuai dengan penerapan PSAK No.18. Metode deskriptif adalah bagian dari kualitatif yaitu metode yang digunakan untuk mempelajari sedalam-dalamnya salah satu gejala yang nyata dalam suatu fenomena. Metode deskriptif ini menganalisa, mengklasifikasi dan menyelidiki dengan teknik survey, interview dan observasi untuk mengetahui apakah pelaporan dana pensiun telah sesuai dengan sistem atau standar pelaporan PSAK NO. 18, karena dalam hal ini sangat penting untuk pengumpulan data yang akan diteliti selanjutnya. Penelitian ini dilakukan pada PT. Pos Indonesia Cabang Tomohon 95400, Jl. Ps. Lama Tomohon No. 72, Talete Satu, Ke. Tomohon Tengah, Kota Tomohon, Sulawesi Utara 95446. Penelitian ini dilakukan dari Bulan November 2024 – Juni 2025.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh data dalam penelitian yaitu data primer dan sekunder. Pada penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara sebagai informasi kemudian peneliti akan memeriksa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian. Setelah semua informasi terkumpul, peneliti akan menganalisis apakah catatan dana pensiun PT. Pos Cabang Tomohon telah sesuai dengan PSAK No.18. Teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian adalah analisis data model Milles dan Huberman, meliputi : pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan mengambil kesimpulan. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, kajian teori maka pada sub bab ini peneliti akan menyajikan hasil penelitiannya melalui tabel perbandingan Penerapan Akuntansi dan Laporan Keuangan dana pensiun Menurut PSAK Nomor 18 disesuaikan dengan laporan keuangan yang berlaku diperusahaan

No	Pengungkapan laporan keuangan berdasarkan pernyataan standar akuntansi nomor 18	Perlakuan di perusahaan	Kesesuaian laporan keuangan dana pensiun PT.Pos Indonesia Cab. Tomohon
1.	Laporan Aset Neto Tersedia Untuk Manfaat Purnakarya:		
	a. Aset Pada Akhir Periode Bersangkutan Sesuai Klasifikasinya	Aset pada akhir periode di bank sulut terdiri dari investasi, aset lancar di luar invesasi, aset operasional.	Sesuai
	b. Rincian Setiap Investasi Tunggal Yang Melebihi 5% Dari Aset Neto Tersedia Untuk Manfaat Purnakarya Atau 5% Untuk Setiap Kelas Atau Jenis Surat Berharga	Investasi tunggal yang Melebihi 5% dari aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya dikelompokkan antara lain surat berharga negara, tabungan, deposito on call, deposito berjangka, obligasi, unit pernyataan reksa dana, penempatan Langsung, tanah dan bangunan.	Sesuai
	c. Rincian Setiap Investasi Pemberi Kerja	Dalam laporan aset neto tidak memaparkan secara rinci investasi pada setiap pemberi kerja. Informasi tersebut diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan	Sesuai
	d. Liabilitas Kecuali Nilai Aktuarial Atas Manfaat Purnakarya Terjanji.	Dana pensiun bank sulutgo mengungkapkan liabilitas di luar kewajiban aktuarial berupa pendapatan diterima di muka dan liabilitas lainlain	Sesuai
2.	Laporan perubahan aset neto Tersedia untuk manfaat Purnakarya menyajikan hal-hal:		
	a. Iuran Pemberi Kerja	Iuran normal pemberi kerja pada laporan perubahan aset neto dana pensiun Pos Indonesia Cab Tomohon termasuk dalam klasifikasi iuran jatuh tempo.	Sesuai
	b. Iuran Karyawan	Iuran normal pekerja pada laporan perubahan aset neto dana pensiun PT.Pos Indonesia Cab Tomohon termasuk dalam klasifikasi iuran jatuh tempo.	Sesuai

No	Pengungkapan laporan keuangan berdasarkan pernyataan standar akuntansi nomor 18	Perlakuan di perusahaan	Kesesuaian laporan keuangan dana pensiun PT.Pos Indonesia Cab. Tomohon
	c. Pendapatan Investasi Seperti Bunga dan Dividen	Bunga dan dividen pada laporan perubahan asset neto dana pensiun PT. Pos Indonesia cab Tomohon termasuk dalam pendapatan investasi	Sesuai
	d. Pendapatan Lain-lain	Pendapatan pada dana pensiun PT.Pos Indonesia Cab Tomohon diungkapkan sebagai pendapatan lain di luar investasi.	Sesuai
	e. Manfaat yang dibayarkan dan terutang (misalnya purnakarya kematian, dan cacat serta pembayaran lumpsum)	Manfaat yang dibayarkan atau terutang diungkapkan dalam laporan perubahan aset neto sebagai manfaat jatuh tempo. akun-akun manfaat pensiun jatuh tempo diungkapkan secara lebih rinci dalam catatan atas laporan keuangan.	Sesuai
	f. Beban Administrasi	Beban administrasi dana pensiun PT.Pos Indonesia Cab Tomohon diungkapkan sekaligus dalam beban operasional	Sesuai
	g. Beban Lain-lain	Selain beban administrasi dana pensiun PT.Pos Indonesia Cab Tomohon mengungkapkan beban lain berupa beban investasi dan beban di luar investasi	Sesuai
	h. Pajak Penghasilan	Pajak penghasilan dana pensiun PT.Pos Indonesia Cab. Tomohon diungkapkan sekaligus dalam beban operasional.	Sesuai
	i. Laba Rugi pelepasan investasi dan perubahan nilai investasi.	Laba (Rugi) pelepasan investasi diungkapkan dalam klasifikasi pendapatan investasi.	Sesuai
	j. Transfer dari dan untuk program purnakarya lain	Dana pensiun PT.Pos Indonesia Cab Tomohon tidak memiliki transaksi pengalihan dari dan	Sesuai

No	Pengungkapan laporan keuangan berdasarkan pernyataan standar akuntansi nomor 18	Perlakuan di perusahaan	Kesesuaian laporan keuangan dana pensiun PT.Pos Indonesia Cab. Tomohon
		kepada program purnakarya lain.	
3.	Deskripsi Mengenai Kebijakan Pendanaan	Dana pensiun PT.Pos Indonesia Cab Tomohon memiliki kebijakan pendanaan dengan menggunakan arahan investasi yang sudah ditentukan oleh pendiri.	Sesuai

Pembahasan

Akuntansi dana pensiun PPMP di PT.Pos Indonesia Cabang Tomohon yang sudah disusun berdasarkan dengan standar yang berlaku yang di dalamnya mengenai pengungkapan laporan keuangan dana pensiun. Laporan keuangan yang diterapkan oleh Dana Pensiun PT. Pos Indonesia Cabang Tomohon keseluruhannya sudah sesuai dengan PSAK yang berlaku dalam hal ini PSAK Nomor 18 dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan dana pensiun yang menggunakan PPMP. Laporan Keuangan Dana Pensiun baik yang menyelenggarakan PPMP maupun PPIP mencakup Laporan Aset Bersih, Laporan Perubahan Aset Bersih, Neraca, Perhitungan Hasil Usaha, Laporan Arus Kas, Dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan dana pensiun PT. Pos Indonesia Cabang Tomohon bertujuan menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk memperkirakan kemampuan suatu dana pensiun pada masa sekarang dan yang akan datang dalam memenuhi kewajiban untuk membayar manfaat pensiun kepada peserta pada waktunya. Berdasarkan laporan keuangan tersebut, maka Laporan Keuangan Dana Pensiun PT. Pos Indonesia Cabang Tomohon pada lampiran telah sesuai dengan teori yang ada.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Informasi dan pelaporan yang di ungkapkan dalam pelaporan keuangan dana pensiun pada PT. Pos Indonesia Cabang Tomohon telah mematuhi Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku yaitu PSAK No.18 atau dapat dikatakan bahwa laporan keuangan dana pensiun pada PT. Pos Indonesia Cabang Tomohon telah sesuai dengan PSAK No.18. Hal tersebut dapat dilihat dari pelaporan keuangan dana pensiun Pos Indonesia Cabang Tomohon bahwa telah mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku baik undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 dan PSAK No.18 sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan.

Berdasarkan hasil penelitian saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini sesuai dengan kesimpulan yaitu: Dana Pensiun PT. Pos Indonesia Cabang Tomohon diharapkan dapat mempertahankan kredibilitas penyusunan Laporan keuangan agar tetap konsisten dan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) Nomor 18.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, & Ensiwi. (2010). Perhitungan Dana Pensiun untuk Dana Pensiun Normal Berdasarkan metode constant dollar studi kasus PT Taspen Palembang. *Jurnal Penelitian Sains*, 12(20).
- Anggraeni, A., & Kurnia, A. (2012). Analisis Kinerja Keuangan Dan Rasio Kecukupan Dana Pada Dana Pensiun Pemberi Kerja Manfaat Pasti Di Indonesia. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 1(11).
- Bahri, S. (2019). *Pengantar Akuntansi Berdasarkan SAK ETAP Dan IFRS. Edisi Revisi*. Yogyakarta: ANDI.
- Dwiranda. (2010). Kecukupan PSAK Tentang akuntansi dana pensiun dalam mengakomodasi kebutuhan standar akuntansi investasi tanah dan bangunan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 10(3).
- Fahmi, T., & Pratono. (2013). Analisis Pemanfaatan Dana Pensiun Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Hidup Pns Pensiunan Guru Kota Medan. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 1(4).
- Ismail. (2010). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Kartikahadi. (2015). *Akuntansi Keuangan Berdasarkan SAK Berbasis IFRS. Edisi Kedua. Buku 1*. Jakarta: Penerbit Ikatan Akuntan Indonesia.
- Kasmir. (2014). *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kasmir. (2016). *Analisis Laporan Keuangan. Edisi Pertama. Cetakan Sembilan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kasmir. (2017). *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya. Edisi Revisi. Cetakan Kedelapanbelas*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Lismenawati. (2017). *Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 18 Atas Laporan Keuangan Dana Pensiun pada PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero)*.
- Nussy, A. (2014). *Analisis Penerapan PSAK No.18 Mengenai Akuntansi Dana Pensiun Pada Dana Pensiun PT. Taspen*.
- Nussy, Andika. (2017). Analisis Penerapan PSAK No.18 Mengenai Akuntansi Dana Pensiun Pada PT. Taspen Cabang Manado. *Jurnal Bisnis Terapan*, 1(1).
- Pandey, M. (2019). *Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.18 Akuntansi Dana Pensiun di Bank Mandiri Taspen Cabang Manado*.
- F. K. (2022). Pengaruh financial literasi, aplikasi keuangan dan kompetensi terhadap kinerja pengelolah keuangan pada universitas negeri manado. *Literacy jurnal pendidikan ekonomi*.
- James Manengkey, A. K. (2020). Analisis Penerapan SAK ETAP Pada Koperasi Di Kabupaten Minahasa. *Jurnal Akuntansi Manado*.
- Puspitasari, Tony, & Agus. (2016). Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 18 Tentang Akuntansi Dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero), TBK. *Jurnal EMBA*, 4(1).
- Rengkung, & Kalangi, L. (2015). Evaluasi pencatatan dan pelaporan dana pensiun pada dana pensiun pemberi kerja (studi kasus pada PT. PLN wilayah suluttenggo). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(3).
- Saefuloh. (2015). Penerapan Psak No.18 Pada Dana Pensiun Dan Laporan Keuangan Dana Pensiun Pada PT Taspen BTPN Medan. *Jurnal EMBA*, 2(1), 68.
- Tinneke Evie Meggy Sumual, A. B. (2020). Penyusunan Laporan Keuangan Umkm Berdasarkan Sak-Emkm (Studi Kasus Pada Umkm Restoran Delli Tomohon). *JAIM: Jurnal Akuntansi Manado*.
- Taswan. (2015). *Akuntansi Perbankan, Edisi III*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Wahab, Z. (2005). *Dana Pensiun dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.